

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1378 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, tugas

pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mencapai tugas tersebut pemerintah dituntut untuk menampilkan para aparatur pemerintahan yang mampu memahami bagaimana menciptakan pelayanan yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengingat bahwa SDM aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (*key leverage*) dari reformasi birokrasi.

Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas organisasi, sebab manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya manusia perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan agar dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia atau pegawai merupakan aset utama dari setiap organisasi atau perusahaan, karena peran aktif pegawai sangat menentukan berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah daerah berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, kesehatan, dan mentalitas (moral). Menurut Sudarwan Danim (1996:45-46) dalam buku Transformasi Sumber Daya Manusia, berikut pengertiannya “Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).”

Jenjang pendidikan memiliki pengaruh penting dalam pembentukan perilaku dan pola pikir seseorang. Latar belakang pendidikan yang diraihnya dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Keselarasan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas, akan mempermudah pegawai untuk memahami dan melaksanakan tugasnya. Memiliki kesehatan yang prima juga perlu diperhatikan oleh setiap pegawai agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada kendala. Selain itu mentalitas (moral) yang baik sangat penting dan bisa menunjang kerja. Dengan demikian semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik pula kinerja pemerintah.

Terciptanya kualitas sumber daya manusia berkontribusi besar dalam mewujudkan tujuan organisasi secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Efektivitas merupakan gambaran dari suatu organisasi terhadap pencapaian sasaran, tujuan organisasi atau hasil kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas kerja menitik beratkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi penghamburan waktu, biaya, dan tenaga.

Terwujudnya efektivitas kerja diharap dapat mempercepat dan memperlancar kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik

dan tepat guna bagi masyarakat dibutuhkan aparatur pemerintah yang handal, efektif, efisien, professional dalam pekerjaannya, serta tanggap kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mengembangkan efektivitas kerja tersebut maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bisa mendukung perkembangan efektivitas kerja.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan peneliti pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, terdapat efektivitas kerja pegawai yang masih rendah. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Kerja yaitu hasil pekerjaan dibawah kondisi normal. Hasil pekerjaan beberapa pegawai pada bagian umum menurut peneliti masih belum sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan hasil pekerjaan yang telah ditentukan membuat kuantitas kerja tersebut kurang maksimal. Berdasarkan sasaran kerja pegawai jabatan pengadministrasi persuratan memiliki tugas mengirim surat/dokumen, menghadiri acara seremonial, mendistribusikan surat dalam skpd/ hari, mencari referensi dan informasi, memelihara arsip/dokumen kuno, menata arsip dan membuat laporan tetapi dalam pelaksanaannya hanya beberapa tugas saja yang dilaksanakan.
2. Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai dalam bentuk kerapian dan ketelitian. Kualitas hasil pekerjaan pada bagian umum menurut peneliti kurang maksimal dikarenakan masih terdapat berkas-berkas yang tidak disimpan sesuai dengan klasifikasinya. Sehingga terdapat kesulitan untuk mencari ulang berkas yang dibutuhkan.
3. Pemanfaatan Waktu yaitu pegawai dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masih terdapat pegawai tidak datang tepat waktu ke kantor. Hal ini dapat

berakibat dalam penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berikut peneliti akan menjabarkan tingkat kehadiran pegawai pada bagian umum

Tabel 1.1

Rekap Kehadiran Pegawai Bagian Umum pada Bulan

September - November 2019

No	Bulan	Jumlah Pegawai	Datang Tepat Waktu	Pulang Tepat Waktu	Jumlah Hari Kerja
1	September	21	298	342	21
2	Oktober	21	319	371	23
3	November	21	317	340	21

Sumber : Dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung 2019

Berdasarkan indikator diatas, masalah tersebut diduga oleh peneliti disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat pada:

1. Latar belakang pendidikan, pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi manusia. Terlihat keterampilan pegawai Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang masih belum mampu menguasai teknologi perangkat komputer dan internet dengan baik sebagai alat bantu untuk menunjang percepatan penyelesaian pekerjaan. Berikut peneliti jabarkan latar belakang pendidikan pegawai Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Tabel 1.2

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Bagian Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

No	Pendidikan	Jumlah
1	STRATA 2	5
2	STRATA 1	4

3	SLTA	12
Jumlah Pegawai		21

Sumber : Dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 2019

2. Moralitas merupakan keadaan tingkat kesadaran pegawai dalam bekerja. Cara berpikir pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan terlihat masih rendah, hal ini terlihat dari beberapa pegawai saat setelah jam makan siang berakhir masih didapati di luar kantor. Hal ini tentu akan menghambat percepatan penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “**HUBUNGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas kerja pegawai pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas kerja pegawai pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung?
3. Usaha - usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas kerja pada bagian umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas kerja pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung.
2. Mengembangkan data mengenai hambatan-hambatan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas kerja pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Untuk menjelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam efektivitas kerja pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama

perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pikiran yang bermanfaat mengenai kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kerja.